

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI TIMUR 2016



<http://kutimkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KUTAI TIMUR 2016

Welfare indicator of kutai Timur 2016

Nomor Publikasi: -
Katalog BPS: 64042.1006

Ukuran Buku:15,5 cm x 23,5 cm
Jumlah Halaman: xi + 69 Halaman

Naskah:
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:
Bidang IPDS

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

TIM PENYUSUN

Naskah : BPS – Kabupaten Kutai Timur

Pengarah : Ach. Yasid Wijaya, SE.

Penanggung Jawab : Melindawati, S.Si.

Design Cover : Dwi Cahyo Aribowo, S.Si

Penulis : Kurnia Wahyu Sahfitri, S.ST

Pengolah Data : Hendro Budiyo, S.Si

Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur Tahun 2016 ini merupakan kelanjutan penerbitan sebelumnya yang disusun setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS (Data Primer) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data yang berasal dari instansi lain (Data Sekunder), dengan maksud untuk memberikan gambaran umum keadaan kesejahteraan rakyat di Kutai Timur.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bidang, yaitu Kependudukan dan KB; Kesehatan; Pendidikan; Ketenagakerjaan; Pola Konsumsi dan Perumahan. Mengingat luasnya cakupan pengertian kesejahteraan dan terbatasnya data yang tersedia, maka publikasi ini disusun dalam bentuk makro berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Sangatta, Oktober 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kalimantan Timur,

Ach. Yasid Wijaya, SE
NIP. 19641026 199401 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii
 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Metodologi	3
1.4. Sistematika Penyajian	3
1.5. Konsep dan Definisi	4
 2. KEPENDUDUKAN DAN KB	
2.1 Jumlah Penduduk	15
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	16
2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana	20
 3. KESEHATAN	
3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	31
3.2 Tenaga Penolong Persalinan	32
3.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	34
	40
 4. PENDIDIKAN	
4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan	38
4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	42
 5. KETENAGAKERJAAN	
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja	48
5.2 Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	53
5.3 Jam Kerja	56
 6. PERUMAHAN	
6.1 Fasilitas Rumah Tinggal	59
6.2 Kualitas Rumah Tinggal	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kutai Timur, Tahun 2015	16
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kutai Timur, Tahun 2015	19
Tabel 2.3	Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan di Kutai Timur, Tahun 2015	21
Tabel 2.4	Persentase Wanita 10 Tahun ke atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kutai Timur, Tahun 2015	23
Tabel 2.5	Rata-rata jumlah anak lahir hidup dan anak masih hidup per wanita pernah kawin usia 15-49 tahun, tahun 2015	24
Tabel 2.6	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin yang Pernah dan Sedang Memakai Alat Kontrasepsi di Kutai Timur, Tahun 2015	24
Tabel 2.7	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai di Kutai Timur, Tahun 2015	26
Tabel 3.1	Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan jenis kelamin di Kutai Timur, Tahun 2015	29

Daftar Tabel

Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir, jumlah hari sakit dan rata-rata lama sakit (hari) di Kutai Timur, Tahun 2015	30
Tabel 3.3	Persentase Penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat di Kutai Timur, Tahun 2015	32
Tabel 3.4	Persentase anank usia kurang dari 2 tahhun yang pernah dieri asi, rata-rata pemerian asi di Kutai Timur, Tahun 2015	36
Tabel 4.1	Angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin di Kutai Timur, Tahun 2013-2015	39
Tabel 4.2	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan di Kutai Timur, Tahun 2013-2015	40
Tabel 4.3	Angka Partisipasi sekolah (APS) penduduk 7-18 tahun menurut usia sekolah di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	43
Tabel 4.4	Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	45
Tabel 5.1	Perkembangan persentase penduduk usia kerja di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	49
Tabel 5.2	Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	50

Daftar Tabel

Tabel 5.3	Perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenis kelamin di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	64
Tabel 5.4	Perkembangan tingkat kesempatan kerja menurut jenis kelamin di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	53
Tabel 5.5	Perkembangan Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	54
Tabel 5.6	Perkembangan Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan di Kutai Timur, Tahun 2012-2015	56
Tabel 6.1	Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan di Kutai Timur, Tahun 2014-2015	61
Tabel 6.2	Persentase rumah tangga menurut sumber air minum utama di Kutai Timur, Tahun 2014-2015	62
Tabel 6.3	Persentase rumah tangga menurut kualitas perumahan di Kutai Timur, Tahun 2014-2015	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, tahun 2015	18
Grafik 3.1	Persentase balita menurut penolong persalinan terakhir di Kutai Timur, Tahun 2015	33
Grafik 6.1	Jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah terdekat di Kutai Timur, Tahun 2015	64



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang termuat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kutai Timur adalah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tekad dari pemerintah daerah Kutai Timur. Pembangunan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik dan bidang lainnya merupakan bidang-bidang pembangunan yang harus dinikmati oleh semua masyarakat Kutai Timur tanpa membedakan suku, agama, partai politik dan sebagainya.

Untuk dapat melihat sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan

mutlak diperlukan sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Dalam memonitor pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat di Kutai Timur, diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan penduduk Kutai Timur. Disadari bahwa dimensi kesejahteraan rakyat sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan hanya dapat terlihat (*visible*) melalui aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga dan kemiskinan, serta perumahan.

Setiap aspek disajikan secara terpisah dalam bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan diukur. Publikasi ini hanya menyajikan kondisi kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan terukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

1.2. Tujuan

Tujuan secara umum pembuatan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur 2016 dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kutai Timur.

Sedangkan tujuan secara khusus untuk mengetahui tingkat perkembangan dan persebaran penduduk Kutai Timur, memberikan

gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengeluaran rumahtangga dan kemiskinan serta perumahan.

Dengan tersedianya publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kebijakan pembangunan terkait kesejahteraan rakyat Kutai Timur.

1.3 Metodologi

Dalam menyusun publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur 2016 ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil beberapa survei yang telah dilaksanakan BPS seperti Susenas dan Sakernas serta data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi terkait.

Adapun metodologi yang diterapkan dalam menyajikan publikasi ini adalah dengan metode deskriptif. Melalui metode ini, potret kesejahteraan rakyat Kutai Timur 2016 akan dianalisis sesuai dengan tabel-tabel yang tersedia.

1.4 Sistematika penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam tujuh bagian. Masing-masing bagian disajikan uraian secara rinci sesuai dengan tema besar bahasan dalam buku ini. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan buku ini, tujuan, metodologi dan sistematika penyajian serta konsep yang digunakan. Bab II disajikan mengenai kondisi kependudukan di Kutai Timur mencakup jumlah, persebaran dan kepadatan

penduduk, serta Keluarga Berencana. Bagian selanjutnya (Bab III) menyajikan kondisi kesehatan mencakup derajat dan status kesehatan penduduk, tenaga penolong persalinan, pemberian ASI bagi Balita dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Gambaran mengenai kondisi pembangunan dalam bidang pendidikan disajikan pada Bab IV yang meliputi angka partisipasi yang mencakup partisipasi sekolah, partisipasi kasar dan partisipasi murni, putus sekolah, angka melek huruf dan pendidikan yang ditamatkan. Pada Bab V disajikan data ketenagakerjaan yang berisi tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, serta jam kerja. Bab VI perumahan dan lingkungan yang dibahas tentang fasilitas dan kualitas rumah tinggal.

1.5 Konsep dan Definisi

- a. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika

pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

- c. **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- d. **Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah. Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- e. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
- f. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.
- g. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- h. **Anak Lahir Hidup**: Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya.
- i. **Anak Masih Hidup** adalah anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.

j. **Pendidikan:**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

k. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

l. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

m. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh

seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP umum, madrasah tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- n. Dapat Membaca dan Menulis adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

o. Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.

p. Angka Partisipasi;

(1) Angka Partisipasi Sekolah (APS): proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut.

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12} \text{ Masih Sekolah}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

P_{7-12} = Penduduk Usia 7-12 tahun

(2) Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

$$APM_{7-12} = \frac{P_{7-12}^{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

(3) Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APK_{SD} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

q. Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

r. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

- s. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- t. **Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan** adalah penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.
- u. **ASI (Air Susu Ibu)** adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.
- v. **Mengobati sendiri** adalah upaya art yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- w. **Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang menganggur.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu

sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang dikategorikan sebagai penganggur adalah mereka yang sedang:

- (1) Mencari pekerjaan;
- (2) Mempersiapkan suatu usaha;
- (3) Sudah diterima bekerja namun belum memulainya, dan
- (4) Mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang

dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dsb. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh/karyawan.

Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

- x. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- y. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

- z. **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang menganggur dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.

TPT dihitung dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$



2. KEPENDUDUKAN & KB

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Penduduk berperan sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat yang berarti posisi penduduk dalam hal ini adalah sebagai obyek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Pada sisi lain, penduduk juga dapat dipotensikan sebagai penggerak pembangunan yang berarti peran penduduk sebagai subyek pembangunan yang tidak hanya menikmati hasil tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun diikuti dengan tingkat kualitas penduduk yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan dan akan menghambat jalannya proses pembangunan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan suatu wilayah

adalah dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Karena masalah kependudukan memiliki posisi yang penting bagi pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program terkait. Data kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan program kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Penduduk Kutai Timur menurut perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan hasil estimasi penduduk, tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 337.677 jiwa.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan
Di Kutai Timur, Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)
1	Muara Ancalong	16 526
2	Busang	5 715
3	Long Mesangat	5 614
4	Muara Wahau	20 784
5	Telen	7 616
6	Kongbeng	20 648
7	Muara Bengkal	14 967
8	Batu Ampar	5 549
9	Sanggatta Utara	95 312
10	Bengalon	29 982
11	Teluk Pandan	16 126
12	Sanggatta Selatan	24 033
13	Rantau Pulung	9 515
14	Sangkulirang	21 374
15	Kaliorang	10 565
16	Sandaran	8 578
17	Kaubun	12 710
18	Karangan	12 063
Jumlah		336 377

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Estimasi Penduduk 2015

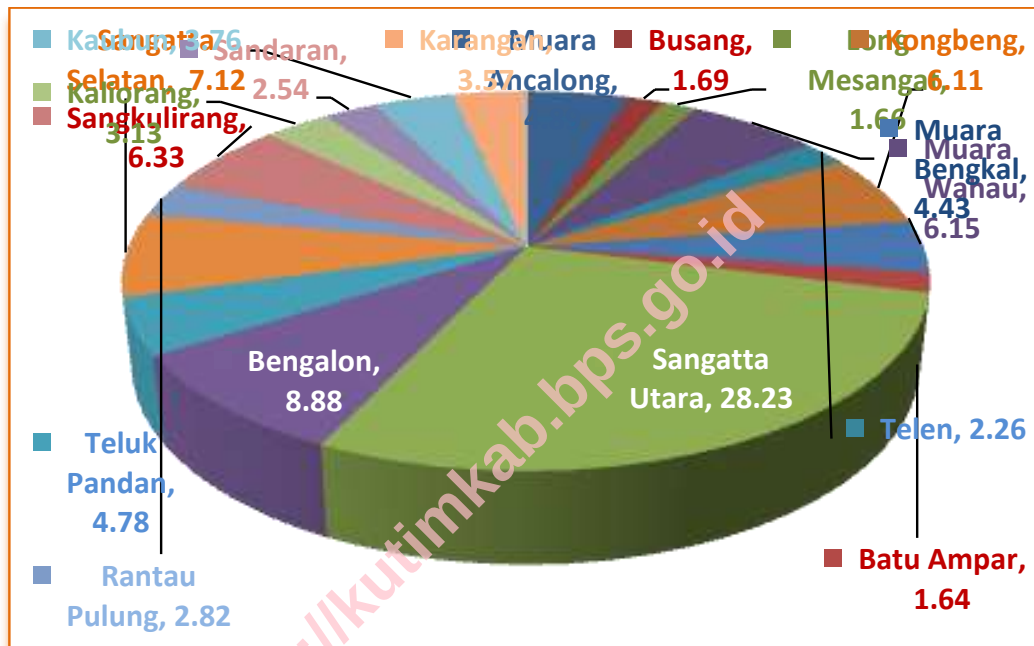
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, yang memperlihatkan rata-rata

jumlah penduduk setiap kilometer persegi. Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kutai Timur secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan yang cukup besar.

Pada tahun 2015 di Kutai Timur persebaran penduduknya yang terbanyak di Kecamatan Sangatta Utara, yaitu sekitar 28,23 persen dari seluruh total penduduk. Selanjutnya adalah di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan masing-masing sebesar 8,88 persen dan 7,12 persen. Di wilayah lain persebarannya di bawah 6 persen. Wilayah yang persebaran penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar proporsinya hanya sekitar 1,64 persen.

Grafik 2.1
Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di
Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Estimasi Penduduk 2015

Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini berdampak pada kepadatan penduduk. Secara umum, pada tahun 2015 kepadatan penduduk di Kutai Timur sebesar 2,89 jiwa per km², yang dapat diartikan bahwa setiap 1 km² wilayah dihuni oleh 2 sampai dengan 3 jiwa. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Busang yaitu 0,65 jiwa setiap km². Kepadatan penduduk yang terendah di Kecamatan Busang yaitu 0,01 jiwa setiap km².

Pola persebaran dan kepadatan penduduk yang demikian kurang menguntungkan bagi pengembangan daerah sehingga menciptakan disparitas yang tajam antara wilayah kecamatan.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km²) Menurut Kecamatan
di Kutai Timur Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Muara Ancalong	16 526	2 739,30	0,17
Busang	5 715	3 721,61	0,65
Long Mesangat	5 614	526,98	0,09
Muara Wahau	20 784	5 724,32	0,28
Telen	7 616	3 129,61	0,41
Kongbeng	20 648	581,27	0,03
Muara Bengkal	14 967	1 522,80	0,10
Batu Ampar	5 549	204,50	0,04
Sanggata Utara	95 312	1 262,59	0,01
Bengalon	29 982	3 196,24	0,11
Teluk Pandan	16 126	831,00	0,05
Sanggata Selatan	24 033	1 660,85	0,07
Rantau Pulung	9 515	143,82	0,02
Sangkulirang	21 374	3 322,80	0,16
Kaliorang	10 565	438,91	0,04
Sandaran	8 578	3 419,30	0,40
Kaubun	12 710	257,45	0,02
Karangan	12 063	3 064,36	0,25
Kutai Timur	336 377	35 747,50	2,89

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Estimasi Penduduk 2015

2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dapat menunjukkan kondisi fertilitas suatu wilayah. Status perkawinan

dibagi menjadi empat, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Semakin besar jumlah penduduk yang berstatus kawin, semakin besar pula peluang tingkat kelahiran di wilayah tersebut.

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan dan jenis kelamin tahun 2015. Secara umum penduduk Kutai Timur berstatus kawin mempunyai proporsi terbesar yaitu 60,82 persen, kemudian disusul penduduk berstatus belum kawin sebesar 34,74 persen. Sedangkan penduduk berstatus cerai hidup 1,45 persen dan cerai mati sebesar 2,98 persen.

Penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (40,78 persen) lebih besar dibanding penduduk perempuan (27,27 persen). Sebaliknya, penduduk perempuan yang berstatus kawin (67,04 persen) lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki (55,71 persen). Kondisi yang sama juga terlihat untuk penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup dan cerai mati persentasenya lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Proporsi penduduk laki-laki berstatus cerai hidup sebesar 1,25 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,70 persen. Sedangkan proporsi penduduk laki-laki berstatus cerai mati sebesar 2,16 persen dan penduduk perempuan sebesar 3,98 persen.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut
Status Perkawinan di Kutai Timur, Tahun 2015

Status Perkawinan	2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	40,87	27,27	34,74
Kawin	55,71	67,04	60,82
Cerai Hidup	1,25	1,70	1,45
Cerai Mati	2,16	3,98	2,98
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Penundaan usia perkawinan pertama dan program keluarga berencana (KB) pada wanita merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Dengan penundaan usia perkawinan pertama akan berdampak memperpendek masa reproduksi, sedangkan semakin muda seseorang melakukan perkawinan, maka akan semakin panjang masa reproduksinya dan akan memperbesar peluang orang tersebut untuk melahirkan anak lebih banyak. Dengan demikian memungkinkan terjadinya tingkat fertilitas yang lebih tinggi.

Wanita yang kawin pada usia sangat muda cenderung belum memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun fisiknya. Risiko yang dihadapi cukup besar pada saat mengandung

dan melahirkan, yang akan berpengaruh pada keselamatan ibu dan anak. Salah satu cara yang dapat membantu menunda usia perkawinan pertama bagi wanita adalah memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, karena akan meningkatkan pengetahuan mereka, khususnya tentang risiko kawin muda bagi ibu sehingga menjadikan mereka berani mengambil keputusan untuk tidak melakukan perkawinan pada usia yang terlalu muda.

Komposisi penduduk wanita usia 10 tahun ke atas di Kutai Timur pada tahun 2015 menunjukkan persentase wanita pada usia perkawinan pertama yang berumur kurang dari 16 tahun sebanyak 12,71 persen. Persentase wanita pada usia perkawinan pertama yang berumur 17-18 tahun sebanyak 20,22 persen. Untuk usia perkawinan pertama yang lebih matang yaitu usia 19 tahun keatas sebanyak 67,08 persen.

Tabel 2.4
Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin
menurut Umur Kawin Pertama di Kutai Timur,
Tahun 2015

Tahun	Umur Kawin Pertama		
	< = 16	17-18	>= 19
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	12,71	20,22	67,08

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup (ALH) dari wanita usia 15-49 tahun memperlihatkan kemampuan reproduksi wanita usia 15-49 tahun. ALH juga merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan program keluarga berencana (KB). Rata-rata jumlah ALH dari wanita usia 15-49 tahun di Kutai Timur pada tahun 2015 sebesar 2,18 yang artinya bahwa kemampuan reproduksi wanita usia 15-49 tahun rata-rata melahirkan 2 anak.

Tabel 2.5
Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup per Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun, Tahun 2015

Kabupaten	ALH	AMH
(1)	(2)	(3)
Kutai Timur	2,18	2,09

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Demikian halnya dengan rata-rata jumlah anak masih hidup (AMH) dari wanita pernah kawin usia 15-49 tahun di Kutai Timur. Pada tahun 2015 mempunyai rata-rata 2,09. Dengan kata lain bahwa rata-rata jumlah anak yang masih hidup dari wanita pernah kawin usia 15-49 tahun di Kutai Timur pada tahun 2015 adalah sebanyak 2 anak.

Tabel 2.6
Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin
yang Pernah, Sedang dan Tidak dalam Memakai Alat
Kontrasepsi
di Kutai Timur, Tahun 2015

Status penggunaan alat/cara KB	2015
(1)	(2)
Pernah	18,95
Sedang	53,21
Tidak	27,84

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa komposisi wanita usia 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Kutai Timur yang sedang dan pernah menggunakan alat/cara KB. Pada tahun 2015 sekitar 53,21 persen wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin menyatakan sedang menggunakan alat/cara KB.

Menunda/menjarangkan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi merupakan upaya untuk menurunkan tingkat fertilitas. Pilihan penggunaan alat/cara KB oleh akseptor diantaranya dipengaruhi oleh harga, ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses alat/cara tersebut, dan sebagainya. Jika terjadi kenaikan harga alat kontrasepsi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan pemakaian alat kontrasepsi akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi dapat mempengaruhi pilihan penggunaan alat

kontrasepsi. Alat kontrasepsi Jika tersedia dan mudah diperoleh, ada kecenderungan alat kontrasepsi tersebut akan digunakan.

Tabel 2.7
Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai Di Kutai Timur, Tahun 2015

Alat/ Cara KB yang Digunakan	2015
(1)	(2)
Pil	28,58
AKDR/ Spiral	4,15
Suntik	57,56
Susuk	5,94
MOP/MOW	2,89
Pantang berkala/kalender	0,88
Total	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Pil dan suntik merupakan alat KB yang banyak dipilih wanita pernah kawin di Kutai Timur. Pada tahun 2015 pil dan suntik digunakan oleh sekitar 86,14 persen akseptor KB. Tingginya prevalensi pemakaian kedua alat KB ini diduga akibat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kedua alat/cara KB ini relatif lebih terjangkau dan lebih mudah didapatkan.



3. KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status kesehatan masyarakat suatu daerah dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan daerah tersebut dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Apabila pemenuhan kesehatan dapat terwujud maka akan lahir SDM berkualitas yang merupakan modal utama dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam keadaan sehat, maka seseorang dapat berbuat, berkarya, berkreasi, dan melakukan kegiatan produktif lainnya. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Secara langsung ataupun tidak langsung, gangguan kesehatan atau penyakit akan mempengaruhi produktivitas dan perekonomian rumah tangga. Penyebabnya adalah biaya untuk pengobatan, hilangnya waktu kerja atau sekolah, dan hilangnya aset keluarga. Sakit secara langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga, yaitu biaya pengobatan (termasuk transport). Penduduk pada kelompok usia produktif, jika sakit akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterimanya, sedangkan pada kelompok anak sekolah akan kehilangan waktu untuk menuntut ilmu. Pada kasus penyakit kronis atau berat, orang akan

terpaksa menjual aset keluarga (seperti: tanah, rumah, perhiasan, dan lain-lain) untuk biaya pengobatan.

Untuk mewujudkan keadaan sehat, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik, dalam hal ini dapat dilihat melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan bila tingkat kesehatan penduduk pada level yang relatif tinggi maka akan memungkinkan mereka mampu mencurahkan seluruh ketrampilan, keahlian, dan kreatifitas

selama jam-jam kegiatan mereka. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan penduduk berada pada kondisi yang kurang baik maka mereka cenderung kurang berperan serta dalam menciptakan tingkat efisiensi pekerjaan yang tinggi. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Grafik 3.1 memperlihatkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Penduduk yang pernah mempunyai keluhan kesehatan sebesar 24,57 persen pada tahun 2015.

Tabel 3.1
Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan
selama sebulan terakhir dan jenis kelamin di Kutai Timur,
2015

Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kutai Timur	23,81	25,47	24,57

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Selain keluhan kesehatan, pada tabel 3.2 juga ditampilkan perkembangan angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Rata-rata lama sakit (hari) sebesar 5,17 persen.

Tabel 3.2
Persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir, jumlah hari sakit dan rata-rata lama sakit (hari), Tahun 2015

Kabupaten	Jumlah Hari Sakit					Rata-rata lama sakit (hari)
	≤ 3	4-7	8-14	15-21	22 - 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kutai Timur	55,23	34,52	4,34	1,86	4,05	5,17

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Penduduk Kutai Timur secara umum lebih banyak memilih berobat ke Puskesmas, karena disamping mudah terjangkau, biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan berobat ke Puskesmas/pustu mencapai 35,50 persen pada tahun 2015.

Fasilitas kesehatan sebagai tempat berobat penduduk selain puskesmas adalah rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, praktek dokter/bidan dan klinik/praktek dokter bersama. Persentase penduduk yang berobat jalan ke praktek dokter/bidan pada tahun 2015 sebesar 18,40 persen.

Persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit tahun 2015 sebesar 33,79 persen. Sedangkan penduduk yang berobat ke lainnya di tahun 2015 sebesar 0,53 persen.

Fasilitas kesehatan tradisional merupakan tempat alternatif untuk berobat bagi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tradisional disini adalah praktek pengobatan tradisional, dukun beranak dan tempat pengobatan lainnya. Pada tahun 2015 persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan ini sebesar 1,88 persen.

Tabel 3.3
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat
Berobat di Kutai Timur, Tahun 2015

Fasilitas kesehatan	2015
(1)	(2)
Rumah sakit pemerintah	16,01
Rumah sakit swasta	17,78
Praktek Dokter/bidan	18,40
Klinik/praktek dokter bersama	17,30
Puskesmas/pustu	35,50
UKBM*	1,89
Praktek pengobatan tradisional	1,88
Lainnya	0,53

UKBM* terdiri dari poskesdes, polindes, posyandu, balai pengobatan

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

3.2 Tenaga Penolong Persalinan

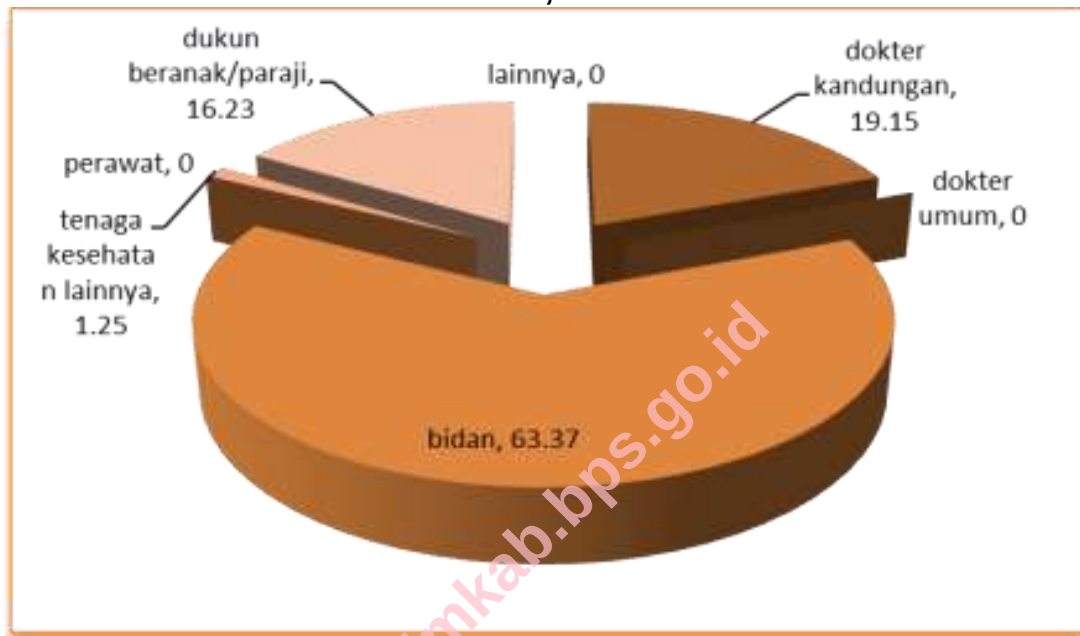
Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga penolong persalinan. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu saat

melahirkan. Tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun atau lainnya, karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Walau demikian di Kutai Timur masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun dan tenaga lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasanya terdapat di daerah perdesaan. Selain itu, faktor pendidikan dari masyarakat juga turut mempengaruhi dalam hal pemilihan penolong persalinan.

Persentase balita menurut penolong persalinan terakhir di Kutai Timur oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya) pada tahun 2015 sebesar 83,77 persen. Sebaliknya, persentase balita dengan penolong persalinan terakhir oleh dukun dan tenaga lainnya sebesar 16,23 persen pada tahun 2015.

Grafik 3.1
Persentase Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir
di Kutai Timur, Tahun 2015



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

3.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan. Usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia akan lebih baik jika dilakukan sejak dini. Salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh dalam upaya tersebut adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI mengandung semua bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bahkan bahan tersebut bernilai gizi tinggi dan serasi untuk kebutuhan bayi seperti laktosa serta bermacam bahan lemak dan protein. Di dalamnya terdapat

pula bermacam bahan lain yang sangat dibutuhkan seperti enzim, komponen bioaktif (Roslina Siregar, dkk 1993., Menyusui dan Kesehatan Anak). Selain itu, ASI juga mengandung zat kekebalan tubuh (penolak/pencegah penyakit) serta dengan memberikan ASI kepada balita akan memberikan kedekatan batin dan menumbuhkan kasih sayang antara ibu dengan anak.

Kesadaran ibu untuk memberikan gizi yang baik pada anaknya secara kuantitatif dapat ditunjukkan oleh angka persentase tertinggi untuk masa menyusui sampai bayi berusia kurang dari 24 bulan. Di Kutai Timur tahun 2015, persentase balita yang diberi ASI selama 20-23 bulan sebesar 4,59 persen. Lama pemberian ASI yang dianggap ideal yaitu antara 20-23 bulan. Dari hasil Susenas 2015 balita di Kutai Timur yang disusui antara 20-23 bulan sebanyak 4,59 persen. Lama pemberian ASI pada balita antara 16-19 bulan tercatat sebesar 21,53 persen. Balita yang diberi ASI selama 12-15 bulan sebanyak 22,88 persen dan yang diberi ASI selama < 12 bulan sebanyak 51,00 persen.

Tabel 3.4
Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang pernah
diberi ASI, rata-rata lama pemberian ASI di Kutai Timur,
Tahun 2015

Lamanya Disusui (Bulan)	2015
(1)	(2)
<12	51,00
12-15	22,88
16-19	21,53
20-23	4,59
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015



4. PENDIDIKAN

Sumber daya manusia (SDM) yang bermoral dan berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya ketersediaan SDM yang bermoral dan berkualitas menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya, dan akan semakin majulah bangsa tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan diantaranya mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, 20 persen

anggaran pendidikan dan bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan. Indikator pendidikan dibagi menjadi tiga macam yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan

Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca

dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan dengan kemampuan baca tulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Hal ini mengandung arti bahwa melek huruf merupakan indikator paling dasar dalam telaah masalah pendidikan di suatu daerah.

Tabel 4.1
Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas menurut
Jenis Kelamin di Kutai Timur, Tahun 2013-2015

Melek Huruf 15 +	2013	2014	2015
(1)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	99,19	99,00	99,20
Perempuan	96,65	96,82	98,84

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Angka melek huruf di Kutai Timur pada tahun 2015 adalah 99,04 persen, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Angka melek huruf bila dilihat menurut jenis kelamin penduduk, angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2015 sekitar 99,20 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka melek huruf penduduk perempuan sebesar 98,184 persen.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis baik huruf latin dan atau huruf lainnya, semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Buta Huruf
di Kutai Timur, Tahun 2013-2015

Buta Huruf 15 +	2013	2014	2015
(1)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	0,81	0,99	0,80
Perempuan	3,35	3,18	1,16

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Pada tahun 2015 terdapat sekitar 0,96 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. Angka buta huruf mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki . Pada tahun 2015 penduduk perempuan buta huruf sebesar 1,16 persen sedangkan penduduk laki-laki sebesar 0,80 persen.

Tabel 4.3
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kutai Timur, Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	2015
(1)	(2)
Tdk punya Ijasah SD	16,52
SD	30,36
SLTP	18,13
SLTA	30,16
Perguruan Tinggi	4,83
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk, baik yang tidak/belum sekolah, masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki. Dengan diketahuinya jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Kecenderungan semakin membaiknya tingkat pendidikan di Kutai Timur di samping dilihat dari meningkatnya angka melek huruf juga terlihat dari meningkatnya pendidikan yang ditamatkan

penduduk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini dipergunakan sebagai salah satu ukuran dari tingkat kemampuan sumber daya manusia.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan dan keadaan kualitas manusianya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2015, sebagian besar tamat SLTA sebesar 30,16 persen dan tamat SD sebesar 30,36 persen. Secara rinci proporsi penduduk umur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Pemerintah berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemerataan

fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang menjangkau sampai ke pelosok daerah, serta adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk.

APS penduduk di Kutai Timur pada tahun 2015 secara umum mengalami penurunan untuk APS penduduk semua kelompok umur sekolah, kecuali APS penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 96,03 persen pada tahun 2014 menjadi 96,75 persen pada tahun 2015. APS pada kelompok umur 7-12 tahun menurun dari 99,71 persen pada tahun 2014 menjadi 99,47 persen pada tahun 2015. Sedangkan APS umur 16-18 tahun dari 85,96 persen pada tahun 2014 menurun cukup signifikan menjadi 80,45 persen pada tahun 2015.

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kutai Timur, Tahun 2012-2015

Usia Sekolah	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	99,33	99,81	99,71	99,47
13-15	93,66	94,63	96,03	96,75
16-18	77,70	82,22	85,96	80,45

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

APK (Angka Partisipasi Kasar) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima

pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu di wilayah tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) diperoleh dengan membagi jumlah murid terdaftar di tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam menafsirkan APK, karena APK mengandung keluar masuknya anak-anak di atas atau di bawah usia sekolah yang bersangkutan sehingga angkanya bisa melebihi 100 persen. APK di Kutai Timur tahun 2015 untuk jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan dari 109,27 persen pada tahun 2014 menjadi 115,57 persen pada tahun 2015. APK SLTP menurun dari 102,14 persen pada tahun 2014 menjadi 10,79 persen pada tahun 2015. APK SLTA meningkat dari 86,67 persen pada tahun 2014 menjadi 88,97 persen pada tahun 2015.

Tabel 4.5
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni menurut
Jenjang Pendidikan di Kutai Timur, Tahun 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
APK				
• SD	109,63	104,94	109,27	115,57
• SLTP	85,53	94,45	102,14	101,79
• SLTA	87,07	87,65	86,67	88,97
APM				
• SD	94,93	96,38	97,33	98,87
• SLTP	68,79	76,96	81,90	83,93
• SLTA	73,46	69,03	71,25	71,03

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

APM (Angka Partisipasi Murni) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, dengan kata lain APM mengukur proporsi anak yang sekolah tepat waktu. APM dibagi dalam 3 jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Program pemerintah wajib belajar 9 tahun berarti yang menjadi sasaran program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SLTP). APM di Kutai Timur tahun 2015 untuk

jenjang SD, SLT menunjukkan peningkatan, kecuali jenjang SLTA yang mengalami penurunan. APM jenjang SD naik dari 97,33 persen menjadi 98,87 persen dan jenjang SLTP naik dari 81,90 persen menjadi 83,93 persen. Sedangkan APM jenjang SLTA menurun dari 71,25 persen menjadi 71,03 persen.

.

<http://kutimkab.bps.go.id>



5. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Manusia dalam hal ini tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai bidang. Karena di dalam proses produksi barang dan jasa, manusia merupakan faktor yang paling penting dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain yaitu sebagai tenaga kerja yang dapat menjalankan dan menggunakan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jumlah tenaga kerja yang tepat serta kualitas yang baik dapat meningkatkan jumlah produksi.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun. Perkembangan dari Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 5.1. Dalam publikasi ini PUK dibagi menjadi tiga kelompok usia yaitu 15-24, 25-54 dan 55+. Kelompok usia 15-24 tahun adalah kelompok usia yang sudah dikategorikan menjadi kelompok usia kerja, meskipun semestinya mereka masih harus sekolah. Kelompok usia 25-54 tahun adalah mereka yang produktif dalam pasar kerja, dan usia 55+ adalah mereka yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam pasar kerja.

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia kerja menurut kelompok umur di Kutai Timur pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya kecuali kelompok umur 55 tahun ke atas. Penduduk kelompok usia 15-24 tahun di Kutai Timur pada tahun 2015 sebesar 25,12 persen, dan kelompok usia produktif 25-54 tahun sebesar 65,21 persen. Sedangkan untuk usia kurang produktif 55 tahun atau lebih sebesar 9,67 persen.

Tabel 5.1
Perkembangan Persentase Penduduk Usia Kerja
di Kutai Timur, Tahun 2012-2015 (Agustus)

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-24	26,19	25,98	25,78	25,12
25-54	66,77	66,43	65,68	65,21
55+	7,04	7,59	8,54	9,67

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Sakernas 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas). Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang cuti, dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (penganggur). Dari TPAK, kita dapat melihat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sehingga berpotensi untuk dapat memproduksi barang dan jasa. Selain itu, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan penganggur). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja

yang memasuki pasar kerja atau yang sesungguhnya terlibat secara ekonomi atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. TPAK Kutai Timur pada tahun 2015 sebesar 59,89 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (61,94 persen). Dapat dilihat pula bahwa TPAK untuk penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dari penduduk perempuan. TPAK laki-laki sebesar 82,91 persen dan TPAK perempuan sebesar 31,40 persen.

Tabel 5.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kutai Timur, Tahun 2012-2015

Jenis Kelamin	TPAK			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	88,03	87,42	84,61	82,91
Perempuan	37,89	38,22	33,38	31,40
Total	65,64	65,51	61,94	59,89

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Sakernas 2015

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk yang tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan) tetapi sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (penganggur)

terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja akan tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Tabel 5.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin
di Kutai Timur, Tahun 2012-2015

Jenis Kelamin	TPT			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	6,24	4,20	5,87	4,51
Perempuan	7,20	11,47	4,93	7,22
Total	6,49	6,09	5,65	5,14

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Sakernas 2015

TPT pada tahun 2015 di Kutai Timur sebesar 5,14 persen, atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (5,65 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin,

TPT laki-laki lebih rendah dibanding dengan TPT perempuan. TPT laki-laki tahun 2015 sebesar 4,51 dan TPT perempuan sebesar 7,22.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK dapat menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dari besarnya TKK, kita dapat melihat besarnya peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja merupakan masalah, karena mereka akan menganggur. Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur, jenis kelamin dan perbedaan struktur ekonomi dan migrasi. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja akan selalu berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Jika TPT semakin besar, maka kesempatan kerja akan semakin kecil, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

TKK pada tahun 2015 di Kutai Timur sebesar 94,86 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (94,35 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin, TKK laki-laki lebih tinggi dibanding dengan TKK perempuan. TKK laki-laki 95,49 dan TKK perempuan 92,78.

Tabel 5.4
Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenis Kelamin
di Kutai Timur, Tahun 2012-2015

Jenis Kelamin	TKK			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	93,76	95,80	94,13	95,49
Perempuan	92,80	88,53	95,07	92,78
Total	93,51	93,91	94,35	94,86

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Sakernas 2015

5.2 Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha/pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha/bidang kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat penduduk bekerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja.

Tabel 5.5
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha di Kutai Timur
Tahun 2012-2015

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	52,84	47,59	49,13	38,88
Pertambangan dan Penggalian	13,74	12,93	13,89	18,78
Industri	0,97	0,28	1,91	1,38
Listrik, Gas dan Air	-	-	-	0,40
Konstruksi	4,05	4,07	5,27	5,63
Perdagangan	12,34	17,73	14,62	15,54
Angkutan dan Komunikasi	2,43	1,52	1,16	2,09
Keuangan	1,30	1,64	1,27	1,58
Jasa	12,33	14,25	12,76	15,71
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Sakernas 2015

Hingga tahun 2015, sektor pertanian masih tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kutai Timur. Pada tahun 2015 persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2015 sekitar 38,88 persen. Sektor lain yang juga menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertambangan pada tahun 2015 menyerap tenaga

sebesar 18,78 persen. Sektor jasa juga mempunyai peran yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 15,71 persen.

Status/kedudukan pekerjaan adalah kedudukan pekerja dalam pekerjaan utamanya. Status pekerjaan dibedakan menjadi empat kelompok yaitu pengusaha (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu pekerja tetap), buruh/karyawan, pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Pekerja keluarga sering diasosiasikan sebagai pekerja pada sektor informal dengan ciri-ciri jumlah jam kerja dan produktifitasnya yang rendah. Sementara itu pekerja dengan status buruh/karyawan dan berusaha dibantu dengan buruh tetap diasosiasikan sebagai pekerja sektor formal.

Status pekerja sebagai buruh/karyawan nampaknya mendominasi proporsi penduduk yang bekerja di Kutai Timur dari tahun ke tahun. Lebih dari separuh (58,86 persen) dari pekerja di Kutai Timur berstatus sebagai buruh/karyawan. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan status pengusaha (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu pekerja tetap) hanya mempunyai porsi sebesar 25,74 persen. Selebihnya sekitar 13,56 persen berstatus sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tabel 5.6
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Status Pekerjaan di Kutai Timur
Tahun 2012-2015

Status Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha Sendiri	13,58	25,51	23,49	14,70
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	15,02	8,19	11,00	11,16
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap	3,18	1,72	2,85	1,68
Buruh/Karyawan	44,30	49,04	53,13	58,86
Pekerja bebas di pertanian	3,05	1,25	0,45	1,48
Pekerja bebas non pertanian	1,69	1,99	0,39	3,14
Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	19,19	12,30	8,70	8,94
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Sakernas 2015

5.3 Jam Kerja

Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir. Jumlah jam kerja 35 jam seminggu dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengelompokkan seorang pekerja apakah dia termasuk pekerja penuh atau pekerja tidak penuh. Penduduk yang jam kerjanya nol jam adalah penduduk

yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Batasan jam kerja 35 jam/minggu digunakan sebagai batas jam kerja normal. Diasumsikan semakin banyak jam kerja dari seorang pekerja selama seminggu, akan semakin tinggi produktifitasnya dan sebaliknya. Namun jumlah jam kerja selama seminggu tersebut tidak sepenuhnya dapat memberi gambaran tingkat produktifitas pekerja.

Di Kutai Timur pada tahun 2015 terdapat sekitar 19,60 persen penduduk yang bekerja di bawah 35 jam selama seminggu dan sekitar 80,40 persen penduduk yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu (Tabel 5.7).

Tabel 5.7
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu
di Kutai Timur, Tahun 2012-2015

Jumlah Jam Kerja Seminggu	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0*)	-	-	-	0,75
< 35	24,10	21,65	28,52	18,85
35+	75,90	78,35	71,48	80,40
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Sakernas 2015

Keterangan: *) Sementara tidak bekerja



6. PERUMAHAN

Salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap derajat kesehatan manusia adalah keadaan lingkungan. Hal ini dikarenakan manusia dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sehat akan melahirkan manusia sehat. Begitu juga orang-orang yang sehat akan menghasilkan lingkungan yang sehat pula.

Rumah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan manusia. Rumah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia dalam usaha melangsungkan kehidupannya. Rumah juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk selain sandang dan pangan. Rumah berfungsi untuk melindungi fisik dari hujan dan panas dan juga sebagai tempat perlindungan dari serbuan binatang buas dan keganasan alam lainnya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka fungsi rumah mengalami perkembangan, tidak saja untuk tempat berlindung dari pengaruh kondisi alam, tetapi juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis atau kejiwaan, gaya hidup, status sosial, dan sebagainya. Dilihat dari sudut kejiwaan, rumah merupakan basis terbentuknya kepribadian dan watak manusia. Dalam lingkungan rumah suatu individu

mengenal norma-norma tertentu dan adat kebiasaan yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat di sekitarnya. Begitu besar peran dan arti sebuah rumah, membuat semua orang selalu berusaha meningkatkan kualitas rumah dan fasilitas rumahnya agar dapat mendukung segala aktivitasnya.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang terdapat di rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumahtangga tersebut diantaranya dapat terlihat dari sumber air minum, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah terdekat, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya serta mendukung dalam terwujudnya kesehatan anggota rumahtangga.

6.1 Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal yang juga menentukan kualitasnya. Fasilitas rumah tinggal yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali

adalah ketersediaan air bersih, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik dan penerangan listrik.

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum, air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih. Jenis sumber air minum merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk, baik dilihat dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dalam hal ini penggunaan sumber air minum dapat dijadikan petunjuk adanya perbaikan kesejahteraan penduduk. Berikut ini ulasan singkat, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik, penerangan listrik, dan ketersediaan air bersih

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa rumahtangga yang mempunyai jamban sendiri semakin tahun semakin meningkat, pada tahun 2015 di Kutai Timur terdapat 84,23 persen rumahtangga yang mempunyai jamban sendiri, meningkat dari tahun 2014 (83,01 persen). Sedangkan rumahtangga yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebanyak 43,11 persen.

Fasilitas penting lainnya adalah penerangan. Akses masyarakat terhadap penerangan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, disamping juga disadari adanya hubungan timbal balik dimana tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber energi seperti penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lain.

Rumahtangga yang menggunakan penerangan listrik baik itu listrik PLN maupun listrik non PLN di Kutai Timur tahun 2015 sebanyak 95,35 persen, mengalami penurunan dari tahun 2014 (96,38 persen).

Tabel 6.1
Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas
Perumahan di Kutai Timur, Tahun 2014-2015

Fasilitas Perumahan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Jamban Sendiri	83,01	84,23
Jamban dg Tangki/Spal	64,18	43,11
Penerangan Listrik PLN / non PLN	96,38	95,35

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Pada tahun 2015 rumah tangga di Kutai Timur yang menggunakan air leding sebagai sumber air minum sebanyak 7,12 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibanding dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,28 persen. Penurunan penggunaan air leding sebagai sumber air minum rumah tangga disebabkan karena semakin banyaknya rumahtangga yang menggunakan air kemasan/air isi ulang dalam mengkonsumsi air minum untuk kehidupan sehari-hari.

Tabel 6.2
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum
Utama di Kutai Timur, Tahun 2014-2015

Sumber Air Minum	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Leding	7,28	7,12
Air Kemasan/Air Isi Ulang	61,77	64,25
Sumur bor/Sumur Terlindung/Mata Air Terlindung	5,63	9,84
Sumur Tak Terlindung/ mata air tak terlindung/sungai/air hujan dan Lainnya	25,32	18,79
Total	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Sumber air minum lain yang juga digunakan oleh penduduk adalah air minum yang berasal dari sumur bor, sumur terlindung dan mata air yang terlindung. Pada tahun 2015, rumah tangga di Kutai Timur yang menggunakan air sumur bor, sumur

terlindung dan mata air yang terlindung sebagai sumber air minumnya mencapai 9,84 persen. Namun masih ada penduduk yang menggunakan sumber air minum dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, sungai, air hujan, dan lainnya yaitu sebanyak 18,79 persen. Masih banyaknya rumah tangga/penduduk yang menggunakan sumber air yang tidak terlindung, bila digunakan sebagai air minum dapat berpotensi pada gangguan kesehatan pencernaan. Namun dengan kebiasaan kita memasak dulu sebelum dikonsumsi, pengaruh tersebut dapat berkurang.

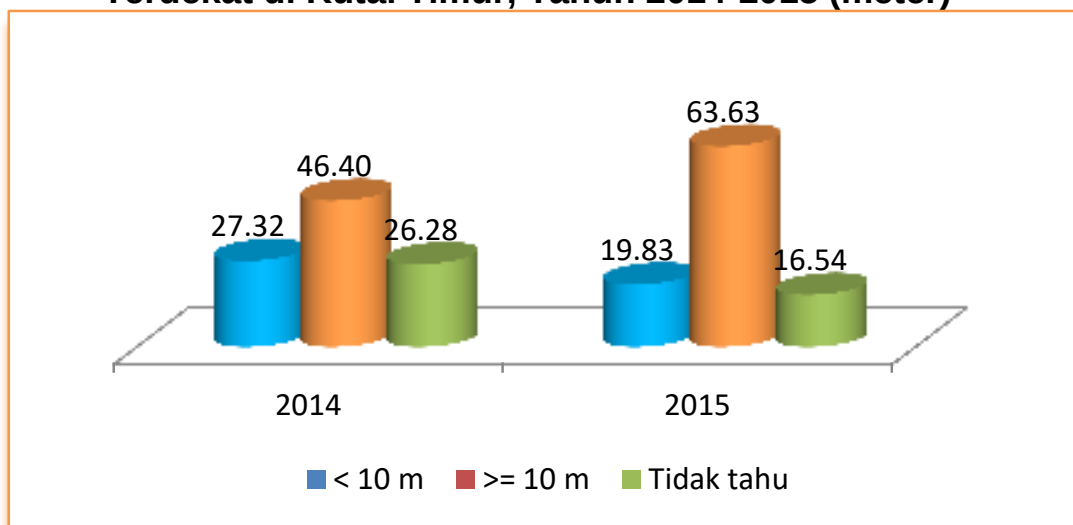
Air minum layak terdiri dari air yang bersumber dari leding meteran, leding eceran, air terlindung (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak ≥ 10 meter dari tempat penampungan kotoran/limbah dan air hujan, sedangkan air kemasan terdiri dari air kemasan bermerk dan air isi ulang. Sementara itu untuk air minum tidak layak terdiri dari air yang minum yang bersumber dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan air lainnya.

Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, maka masalah pembuangan limbah/kotoran meningkat. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan limbah rumah tangga merupakan masalah pokok untuk sedini mungkin diatasi. Karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber dari limbah/kotoran dapat melalui beberapa cara atau jalan antara lain

yaitu melalui air, tangan, lalat, dan tanah. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan limbah/kotoran disertai dengan cepatnya pertambahan jumlah penduduk, jelas akan mempercepat penyebaran penyakit.

Tempat pembuangan limbah terdekat sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat pembuangan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar, misalnya seperti tempat pembuangan berupa lubang tanah atau tanah terbuka dapat mencemarkan sumber air di dekatnya dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia juga tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Grafik 6.1
Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Kutai Timur, Tahun 2014-2015 (meter)



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

Jarak sumber air minum, seperti sumur dan mata air dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat patut menjadi perhatian. Jarak sumber air minum, terutama yang berasal dari sumur dan mata air, dengan tempat pembuangan limbah terdekat merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesehatan air minum rumahtangga. Semakin pendek jarak tersebut, maka kemungkinan sumber air minum tersebut tercemar zat-zat ataupun unsur-unsur yang membahayakan kesehatan manusia semakin besar. Jarak yang aman dan ideal untuk tempat pengambilan air minum ke tempat penampungan kotoran adalah 10 meter lebih. Karena dengan jarak ini rembesan dari air limbah tidak bisa meresap sampai ke sumur atau mata air. Kesadaran masyarakat di Kutai Timur untuk menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat pada tahun 2015 cukup tinggi yaitu sekitar 63,63 persen. Angka ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 (46,40 persen). Namun masih ada penduduk Kutai Timur yang menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat (19,83 persen) dan bahkan masih ada yang tidak mengetahui jarak antara sumber air minum yang digunakan ke tempat pembuangan limbah terdekat yaitu sebesar 16,54 persen pada tahun 2015.

6.2 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila rumah tersebut mempunyai atap, dinding dan lantai. Dari ketiga unsur tersebut juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan.

Ditinjau dari segi kesehatan jenis lantai yang digunakan rumah tangga juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Rumah yang memenuhi syarat kesehatan harus memiliki konstruksi lantai yang rapat air dan selalu kering, agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, juga dapat menghindari kelembaban air tanah naik ke lantai. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Lantai tanah kurang baik karena dapat berdebu pada saat musim kemarau dan akan basah pada musim hujan. Lantai yang basah dan berdebu merupakan tempat timbulnya kuman penyakit dan menjadi media penularan berbagai jenis penyakit.

Berdasarkan data dari Susenas pada tahun 2015 di Kutai Timur persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah sebesar 1,15 persen, terjadi sedikit meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi rumah sehat diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal per orang. Luas lantai tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangganya. Luas lantai bangunan rumah harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Selain menggambarkan tingkat kesehatan, luas lantai juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumahtangga. Menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m². Pada tahun 2015 di Kutai Timur masih terdapat 1,18 persen rumah tangga yang menghuni rumah yang luas lantai perorang kurang dari 19 m². Namun bila dilihat perkembangan rumah tangga yang tinggal pada rumah dengan luas lantai per orang kurang dari 19 m² berangsur menurun.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan sebagai tempat tinggal adalah penggunaan atap dan dinding. Persyaratan rumah sehat antara lain memiliki konstruksi bangunan cukup kuat. Salah satu ciri konstruksi bangunan yang cukup kuat adalah memiliki konstruksi atap yang cukup rapat dan

tidak tiris. Jenis atap yang tidak baik untuk kesehatan antara lain ijuk atau rumbia dan lainnya.

Jenis dinding rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persyaratan rumah sehat salah satunya memiliki konstruksi dinding luar yang kuat. Jenis dinding yang baik adalah tembok atau kayu. Dinding rumah sebaiknya kering agar ruangan tidak menjadi lembab, karena dinding yang lembab menimbulkan resiko terjadinya penyakit. Sedangkan dinding bambu dan lainnya tidak baik untuk kesehatan.

Pada tahun 2015 persentase rumah tangga di Kutai Timur yang menggunakan bahan ijuk/rumbia dan bahan lainnya sebagai atap rumahnya sebesar 1,11 persen. Tempat tinggal yang berdinding dengan bahan bambu dan bahan lainnya di sebesar 0,75 persen. Indikator jenis atap berupa ijuk/rumbia dan lainnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014. Sebaliknya, untuk indikator jenis dinding berbahan bambu dan lainnya mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 (Tabel 7.3).

Tabel 6.3
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan
di Kutai Timur, Tahun 2014-2015

Kualitas Perumahan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Lantai Tanah	0,21	1,15
Luas Lantai <19 m ²	1,84	1,18
Atap Ijuk/rumbia + Lainnya	1,34	1,11
Dinding Bambu + lainnya	0,74	0,75

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Susenas 2015

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kutimkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta 75611
Telp. (0549) 23223 Fax. (0549) 24745
Website : <http://kutimkab.bps.go.id>